Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015

Dwi Bambang Deswanto*

Universitas Tanjungpura

Asniar Ismail

Universitas Tanjungpura

Hendarmin

Universitas Tanjungpura

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of local government expenditure based on economic classification consisting of personnel expenditure, capital expenditure, goods and services expenditure, grant expenditure and social assistance expenditure on economic growth and social welfare in the regency/city of West Borneo Province. The data in the study used panel data consisting of time series data (2010 -2015) and cross-section data (14 regency/city in West Borneo Province). Hypothesis testing in this study using multiple linear regression and path analysis. The results obtained personnel expenditure, capital expenditure, and social assistance expenditure have a positive and significant influence to economic growth, while grant expenditure has negative and significant influence to economic growth and Goods and services spending has a negative but insignificant influence to economic growth. Subsequently capital expenditure and economic growth have a positive and significant influence to the social welfare while the goods and services have negative and significant influence to the social welfare. Grant expenditure have negative influence and social assistance expenditure has a positive but insignificant influence to social welfare.

Keywords: *Government Expenditure, Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Human Development Index (HDI)*

1. PENDAHULUAN

Kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara kuantitatif yang diukur melalui pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan cukup menggembirakan. Dimana dalam

* Korespondensi: Dwi Bambang Deswanto, Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Jalan Imam Bonjol, Pontianak 78124 Ilmu Ekonomi, Indonesia, Email : benkitko@gmail.com.

kurun waktu tahun 2011 hingga 2015 rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,46 %, namun dari sisi kualitas pembangunan masih harus ditingkatkan terutama dalam hal pembangunan manusia. Capaian angka indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 sebesar 65,59 menempatkan Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat 29 dari 34 Provinsi. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembangunan manusia yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat masih tertinggal dari provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kerja keras serta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi dalam meningkatkan kualitas pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah peran alokatif, dimana pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah pada sektor yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan secara efektif melalui alokasi yang tepat berdasarkan klasifikasi ekonomi dalam komposisi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Saat ini struktur APBD dan alokasi belanja APBD di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dinilai masih belum berkualitas. Hal itu antara lain dapat dilihat dari porsi belanja pegawai yang masih sangat tinggi dibandingkan porsi belanja modal untuk pembangunan daerah. Proporsi belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Gambar 1. berikut :

Gambar 1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalbar

Berdasarkan Gambar 1 di atas dapat dilihat proporsi belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar dari tahun 2010-2015 rata-rata 45,47% sedangkan untuk proporsi belanja modal dari tahun 2010-2015 rata-rata masih 27,18% dan proporsi belanja barang dan jasa dari tahun 2010-2015 rata-rata 20,80%. Selanjutnya proporsi belanja hibah dan bantuan sosial tahun 2010-2015 rata-rata 2,49% dan 0,68%. Besarnya porsi belanja pegawai dibandingkan dengan belanja lainnya berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah setiap tahun sebelum adanya kebijakan moratorium serta kenaikan gaji secara berkala ditambah lagi dengan adanya gaji 13 dan 14 dan tunjangan kinerja daerah yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan proporsi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2015 dapat dikatakan belanja daerah belum berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari besarnya porsi belanja pegawai yaitu rata-rata sebesar 45,47% dibandingkan dengan belanja modal dengan rata-rata sebesar 27,18% sehingga belanja daerah dianggap belum memberikan dampak yang maksimal dalam pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat memiliki hasil yang berbeda-beda, diantaranya adalah penelitian Priambodo (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa belanja pegawai, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil berbeda didapatkan dalam penelitian Suryati (2015) yang menunjukkan belanja pegawai berpengaruh negatif dan tidak signifikan, belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan serta belanja modal berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap IPM. Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik mengambil judul penelitian “Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat”.

2. KAJIAN LITERATUR

John Meynard Keynes dalam mankiw (2007), menjelaskan teori ekonominya dalam buku yang berjudul “*The General Theory of Employment, Interest and Money*” dimana inti dari kebijakan makro Keynes adalah bagaimana pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat yang mempengaruhi situasi makro, agar dapat mendekati posisi “*Full Employment*”nya. Permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Barang dan jasa diartikan sebagai barang dan jasa yang diproduksi dalam tahun tersebut (barang bekas atau barang yang diproduksi pada tahun-tahun sebelumnya atau barang yang tidak dapat diproduksi seperti tanah, tenaga kerja dan faktor produksi lain, tidak termasuk dalam pengertian “barang dan jasa” dimaksud disini). Dalam perekonomian tertutup permintaan agregat terdiri dari 3 unsur

yaitu: pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga (C), pengeluaran investasi oleh perusahaan (I) dan pengeluaran pemerintah (G). Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi.

Adolf Wagner dalam Soepangat & Gaol (1991), mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin bertambahnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan (*The Law of Ever Increasing State Activite*). Pengeluaran pemerintah sebagian dilakukan untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan (Sukirno, 2011). Peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan antar golongan dalam masyarakat karena perbedaan tingkat pemilikan dan kesempatan penggunaan sumber daya ekonomi pada sektor swasta (Badrudin, 2012). Adolf Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2010).

Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2010) menyampaikan teori berdasarkan pada pandangan mereka melalui pengamatan terhadap pembangunan ekonomi di beberapa negara. Model ini menghubungkan tahapan pembangunan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar. Hal ini disebabkan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan sebagainya. Pada tahap menengah, peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan namun investasi swasta semakin besar. Pihak swasta yang berperan semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik. Pada tahap lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012). Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: *pertama*, peningkatan

kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat yang ditandai dengan selesainya masalah kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, pencapaian tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta produktivitas masyarakat yang meningkat, kesemuanya itu merupakan cermin dari perbaikan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah (Todaro, 2011).

Menurut UU 32/2014 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Standar Akuntansi Pemerintah mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk belanja pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Berdasarkan landasan teoritis mengenai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengeluaran pemerintah serta didukung dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, penulis menyusun prosedur penelitian yang digambarkan dalam model penelitian seperti pada Gambar 2 berikut :

Gambar 2. Model Penelitian

2.1. Pengaruh Belanja Pegawai (X_1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)

Menurut Badrudin (2011), Penerimaan gaji dan honorarium di daerah yang bersangkutan oleh pegawai negeri akan menjadi faktor pendapatan yang akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai negeri tersebut. Oleh karena itu, kegiatan membeli barang dan jasa akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan perubahannya yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja pegawai pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis pertama yang penulis gunakan adalah :

H₁ : X_1 (belanja pegawai) berpengaruh positif terhadap Y_1 (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.2. Pengaruh Belanja Modal (X_2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y_1)

Menurut Halim (2008), belanja modal merupakan bentuk investasi yang merupakan *capital expenditure* sebagai belanja/biaya pengeluaran yang memberi manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Belanja modal digunakan untuk membangun infrastruktur di daerah berupa jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan

dan serta infrastruktur pendukung lain seperti pelabuhan, irigasi dan pasar, dengan infrastruktur yang baik akan meningkatkan daya saing daerah yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi di daerah tersebut. Menurut Aviliani (2009), infrastruktur merupakan bagian penting dalam perekonomian mengingat fungsinya sebagai pendukung dalam kegiatan termasuk untuk mendorong kegiatan investasi, sehingga diperlukan pengeluaran pemerintah berupa belanja modal untuk menciptakan infrastruktur yang mendorong aktivitas ekonomi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis kedua yang penulis gunakan adalah :

H₂ : X₂ (belanja modal) berpengaruh positif terhadap Y₁ (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.3. *Pengaruh Belanja Barang dan Jasa (X₃) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₁)*

Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok belanja langsung digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Badrudin (2012) menyebutkan bahwa belanja barang dan jasa pemerintah akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen yang akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Hasil penelitian Hutabarat (2013), membuktikan belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga yang penulis gunakan adalah :

H₃ : X₃ (belanja barang dan jasa) berpengaruh positif terhadap Y₁ (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.4. *Pengaruh Belanja Hibah (X₄) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₁)*

Menurut Badrudin (2012), belanja hibah pada kelompok belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah pusat atau daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan layanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan

untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga belanja hibah oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja hibah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis keempat yang penulis gunakan adalah :

H₄ : X₄ (belanja hibah) berpengaruh positif terhadap Y₁ (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.5. *Pengaruh Belanja Bantuan Sosial (X₅) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y₁)*

Putra (2016), menjelaskan tujuan pemberian bantuan sosial kepada daerah tertinggal dimaksudkan untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal melalui peningkatan kemampuan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Selain itu pemberian dana bantuan sosial ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat tertinggal sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial ekonomi dan budaya. Hasil penelitiannya menunjukkan belanja bantuan sosial berupa bantuan untuk infrastruktur dan kelembagaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja bantuan sosial pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis kelima yang penulis gunakan adalah :

H₅ : X₅ (belanja bantuan sosial) berpengaruh positif terhadap Y₁ (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.6. *Pengaruh Belanja Pegawai (X₁) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y₂)*

Menurut Sasana (2012) secara konseptual belanja tidak langsung memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan belanja tidak langsung seperti belanja pegawai yang dilakukan secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan publik, pelayanan publik semakin baik akan menciptakan iklim investasi yang baik dan kondusif sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian. Kemudian pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2015) menyimpulkan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang di ukur melalui angka IPM. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja pegawai pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis keenam yang penulis gunakan adalah :

H₆ : X₁ (belanja pegawai) berpengaruh positif terhadap Y₂ (kesejahteraan masyarakat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.7. *Pengaruh Belanja Modal (X₂) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y₂)*

Menurut Badrudin (2011), belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai ruang publik yang tersedia sehingga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Priambodo (2015) dan Hendarmin (2012) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis ketujuh yang penulis gunakan adalah :

H₇ : X₂ (belanja modal) berpengaruh positif terhadap Y₂ (kesejahteraan masyarakat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.8. *Pengaruh Belanja Barang dan Jasa (X₃) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y₂)*

Menurut Badrudin (2012), belanja barang dan Jasa dalam kelompok belanja langsung digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Belanja barang dan jasa pemerintah akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhir akan berpengaruh pada kesejahteraan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Makrifah (2010) dan Suryati (2015) yang menyimpulkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis kedelapan yang penulis gunakan adalah :

H₈ : X₃ (belanja barang dan jasa) berpengaruh positif terhadap Y₂ (kesejahteraan masyarakat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.9. *Pengaruh Belanja Hibah (X₄) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y₂)*

Belanja daerah yang dialokasikan dalam APBD harus diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pane (2011), belanja hibah yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu daerah khususnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja hibah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis kesembilan yang penulis gunakan adalah :

H₉ : X₄ (belanja hibah) berpengaruh positif terhadap Y₂ (kesejahteraan masyarakat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.10. *Pengaruh Belanja Bantuan Sosial (X₅) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y₂)*

Menurut Badrudin (2012), bantuan sosial (bansos) pada kelompok belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L, bansos merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Risiko sosial yang dimaksud di sini adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial baik itu yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat sebagai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. Berdasarkan hal tersebut, penulis menduga bahwa semakin besar belanja bantuan sosial pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis kesepuluh yang penulis gunakan adalah :

H₁₀ : X₅ (belanja bantuan sosial) berpengaruh positif terhadap Y₂ (kesejahteraan masyarakat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2.11. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (Y₁) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y₂)*

Ranis (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. Pendapat yang sama dinyatakan oleh Arsyad (2010) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi sebagai nilai relatif dari perubahan PDRB dari waktu ke waktu menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu pula. Peningkatan pendapatan masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan alokasi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan sebagai indikator angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2010) dan Priambodo (2015) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis menduga bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis kesebelas yang penulis gunakan adalah :

H₁₁ : Y₁ (pertumbuhan ekonomi) berpengaruh positif terhadap Y₂ (kesejahteraan masyarakat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3. METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan bentuk eksplanatori kausalitas yaitu suatu penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh dan hubungan antar variabel yang diteliti. Penelitian ini bermaksud untuk menguji dan menjelaskan pengaruh dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Jenis data yang digunakan bersifat data urutan waktu (*time series*) selama 6 tahun yang dimulai dari tahun 2010 hingga 2015 dan data data silang (*cross section*) untuk 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam konteks penelitian ini, variabel yang diteliti dibagi menjadi dua yaitu : variabel eksogen serta variabel endogen yang terdiri dari variabel endogen intervening dan variabel endogen dependen. Variabel eksogen adalah variabel independen yang

diduga merupakan penyebab yang dapat mempengaruhi variabel lain dalam model dan variabel ini tidak dipengaruhi variabel lain dalam model. Variabel intervening adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen dan sekaligus akan mempengaruhi variabel endogen dependen dalam model. Variabel endogen dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam model dan tidak mempengaruhi variabel lain dalam model. Variabel –variabel tersebut adalah sebagai berikut : variabel eksogen X_1 yaitu belanja pegawai, variabel eksogen X_2 yaitu belanja modal, variabel eksogen X_3 yaitu belanja barang dan jasa, variabel eksogen X_4 yaitu belanja hibah, variabel eksogen X_5 yaitu belanja bantuan sosial, variabel endogen intervening Y_1 adalah pertumbuhan ekonomi, dan variabel endogen dependen Y_2 adalah kesejahteraan masyarakat.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung (Ruherford, 1993). Selanjutnya dengan menggunakan metode analisis jalur dalam penelitian ini dibentuk dua model regresi persamaan struktural yaitu:

- a) Pengaruh X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 terhadap Y_1

$$Y_{1\ it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1\ it} + \alpha_2 X_{2\ it} + \alpha_3 X_{3\ it} + \alpha_4 X_{4\ it} + \alpha_5 X_{5\ it} + \mu_1 \dots\dots\dots(1)$$

- b) Pengaruh $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, Y_1$ terhadap Y_2

$$Y_{2\ it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1\ it} + \beta_2 X_{2\ it} + \beta_3 X_{3\ it} + \beta_4 X_{4\ it} + \beta_5 X_{5\ it} + \beta_5 Y_{1\ it} + \mu_2 \dots\dots\dots(2)$$

dimana :

$Y_{2\ it}$	= Kesejahteraan Masyarakat (KM) yang diproxykan dengan IPM
$Y_{1\ it}$	= Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang diproxykan dengan PDRB
X_1	= Belanja Pegawai (BP) Kabupaten/Kota (juta rupiah)
X_2	= Belanja Modal (BM) Kabupaten/Kota (juta rupiah)
X_3	= Belanja Barang dan Jasa (BBJ) Kabupaten/Kota (juta rupiah)
X_4	= Belanja Hibah (BH) Kabupaten/Kota (juta rupiah)
X_5	= Belanja Bantuan Sosial (BBS) Kabupaten/Kota (juta rupiah)
α dan β	= Koefisien jalur
μ	= <i>Error term</i>

Penggunaan metode analisis jalur (*path analysis*) berarti mengestimasi hubungan kausalitas antar variabel, melalui hubungan langsung (*direct effect*) dan hubungan tidak langsung (*indirect effect*) yang didasarkan pada *standardized coefficients beta* hasil regresi persamaan struktural dalam model jalur. Besarnya pengaruh langsung (*direct effect*) dari suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen, dinyatakan oleh besarnya nilai numerik koefisien jalur (*path coefficient*) dari eksogen ke endogen, sedangkan besarnya pengaruh tidak langsung (*indirect effect*), dilakukan dengan mengalikan nilai koefisien jalur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel mediator (*intervening*)

dengan nilai koefisien jalur pengaruh variabel mediator terhadap variabel endogen. Pengaruh total (*total effect*) dapat dihitung dengan menjumlahkan pengaruh langsung dan tidak langsung (Ghozali, 2016).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan dua model struktural, sehingga untuk menghitung koefisien jalur dilakukan dengan analisis regresi sebanyak dua tahap dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic* 23. Hasil analisis regresi dua model struktural adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Hasil Regresi Model Struktural Pertama

Pengaruh Antar Variabel			Koefisien Jalur	t-sig	Sig.	Keterangan
BP (X ₁)	⇒	PE (Y ₁)	0,878	10,765	0.000	Signifikan*
BM (X ₂)	⇒	PE (Y ₁)	0,165	1,973	0.052	Signifikan**
BBJ (X ₃)	⇒	PE (Y ₁)	-0,081	-0.947	0,347	Tidak signifikan
BH (X ₄)	⇒	PE (Y ₁)	-0,221	-3,318	0.001	Signifikan*
BBS (X ₅)	⇒	PE (Y ₁)	0,168	2,910	0.005	Signifikan*

Tabel. 2
Hasil Regresi Model Struktural Kedua

Pengaruh Antar Variabel			Koefisien Jalur	t-sig	Sig.	Keterangan
BP (X ₃)	⇒	KM (Y ₂)	0,003	0,013	0,990	Tidak signifikan
BM (X ₂)	⇒	KM (Y ₂)	0,271	2,067	0.042	Signifikan*
BBJ (X ₃)	⇒	KM (Y ₂)	-0,318	-2,415	0.015	Signifikan*
BH (X ₄)	⇒	KM (Y ₂)	0,008	0,074	0.941	Tidak signifikan
BBS (X ₅)	⇒	KM (Y ₂)	-0,087	-0,940	0.350	Tidak signifikan
PE (Y ₁)	⇒	KM (Y ₂)	0,630	3,634	0.001	Signifikan*

Ket : * = signifikan $\alpha = 5\%$

** = Signifikan $\alpha = 10\%$

Berdasarkan Tabel 1 dan 2 diatas dapat diketahui koefisien jalur pada kedua model struktural yang ditunjukkan output hasil regresi tersebut, koefisien tersebut dinyatakan sebagai *standardized coefficients* atau dikenal dengan nilai *beta*, dengan demikian dapat dibentuk koefisien jalur dalam kedua model struktural sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,878 X_1 + 0,165 X_2 - 0,081 X_3 - 0,221 X_4 + 0,168 X_5 + \mu_1 \dots \dots \dots (3)$$

$$Y_2 = 0,003 X_1 + 0,271 X_2 - 0,318 X_3 + 0,008 X_4 - 0,087 X_5 + 0,630 Y_1 + \mu_2 \dots \dots \dots (4)$$

Setelah dilakukan perhitungan koefisien jalur serta dibentuk dalam kedua model struktural maka kedua model tersebut dapat dinyatakan dalam grafik analisis jalur dengan bentuk seperti pada Gambar 3 sebagai berikut :

Gambar 3. Diagram Jalur Hubungan Kausal Variabel Eksogen, Endogen Intervening dan Endogen

4.2. Pengujian Variabel Intervening

Menurut Liana (2009), analisis jalur (*Path Analysis*) juga digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening, apabila nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung berarti hubungan sebenarnya adalah tidak langsung dimana variabel intervening memediasi hubungan variabel eksogen dan variabel endogen, dan sebaliknya apabila nilai pengaruh langsung lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung berarti hubungan sebenarnya adalah langsung dimana variabel intervening tidak memediasi hubungan variabel eksogen dan variabel endogen. Hasil perhitungan dari pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilakukan pengujian pengaruh variabel intervening dengan hasil sebagai berikut :

1. Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) belanja pegawai (BP) terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung belanja pegawai (BP) terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi (PE) ($0,003 < 0,553$), Sehingga dapat disimpulkan hubungan sebenarnya adalah tidak langsung, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening yang memediasi diantara belanja pegawai dan kesejahteraan masyarakat.
2. Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) pengaruh langsung belanja modal (BM) terhadap kesejahteraan masyarakat lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung belanja modal (BM) terhadap kesejahteraan masyarakat melalui

pertumbuhan ekonomi (PE) ($0,271 > 0,104$), Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sebenarnya adalah langsung, dimana pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening diantara belanja modal dan kesejahteraan masyarakat.

3. Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) belanja barang dan jasa (BBJ) terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) belanja barang dan jasa (BBJ) terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) ($-0,381 > -0,051$), Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sebenarnya adalah langsung, dimana pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening diantara belanja barang dan jasa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) belanja hibah (BH) terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) belanja hibah (BH) terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) ($0,008 > -0,139$), Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sebenarnya adalah langsung, dimana pertumbuhan ekonomi bukan merupakan variabel intervening diantara belanja hibah dan kesejahteraan masyarakat.
5. Koefisien jalur pengaruh langsung (*direct effect*) belanja bantuan sosial (BBS) terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung belanja bantuan sosial (BBS) terhadap kesejahteraan masyarakat (KM) melalui pertumbuhan ekonomi (PE) ($-0,087 < 0,106$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan sebenarnya adalah tidak langsung, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan variabel intervening diantara belanja bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.

Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total

Pengaruh Variabel Dalam Analisis Jalur	Pengaruh Langsung (<i>Direct Effect</i>)	Pengaruh Tidak Langsung (<i>Indirect Effect</i>)	Pengaruh Total (<i>Total Effect</i>)
BP → PE	0.878	-	0.878
BM → PE	0.165	-	0.165
BBJ → PE	-0.081	-	-0.081
BH → PE	-0.221	-	-0.221
BBS → PE	0.168	-	0.168
PE → KM	0.630	-	0.630
BP → KM	0.003	0.553	0.556
BM → KM	0.271	0.104	0.375
BBJ → KM	-0.318	-0.051	-0.369
BH → KM	0.008	-0.139	-0.131
BBS → KM	-0.087	0.106	0.019

4.3. Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja pegawai (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan besarnya proporsi belanja pegawai dalam total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proporsi belanja pegawai dalam APBD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 -2015 rata-rata sebesar 45,57% (DJP, 2016). Hal ini menggambarkan bahwa belanja daerah sebagian besar digunakan untuk membiayai gaji dan honorarium pegawai negeri di daerah sehingga akan meningkatkan penerimaan gaji dan honorarium pegawai negeri di Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya. Gaji dan honorarium tersebut merupakan faktor pendapatan yang akan digunakan untuk kegiatan konsumsi membeli barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai tersebut, seiring dengan kenaikan gaji dan honorarium pegawai maka terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa yang akan direspon oleh produsen serta penyedia barang/jasa untuk menghasilkan dan menyediakan barang/jasa sesuai keinginan konsumen. Respon yang baik dari produsen dan penyedia barang/jasa lokal yang mampu memproduksi dan menyediakan barang dan jasa sesuai kebutuhan pegawai negeri tersebut membuat pegawai negeri tersebut tidak perlu membeli barang dan jasa yang dihasilkan dan disediakan pada daerah lain. Hal tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut yang selanjutnya akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.3.1. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja modal (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan pada taraf signifikansi $\alpha = 0,10$. Hal tersebut mengindikasikan belanja modal yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan belanja modal yang direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan menimbulkan permintaan akan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat. Permintaan tersebut direspon dengan baik oleh produsen/penyedia barang jasa lokal untuk menyediakan barang dan jasa sesuai yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah seperti pengadaan peralatan dan mesin, jalan, jembatan, bangunan dan infrastruktur lainnya. Hal ini meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut yang menyebabkan perekonomian di daerah tersebut tumbuh.

4.3.2. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja barang dan jasa (X_3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi (Y_1) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan. sehingga hasil studi ini menolak hipotesis ketiga. Belanja barang dan jasa yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena alokasi belanja barang dan jasa pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah seperti perjalanan dinas, ATK, makan dan minum, dan belanja operasional lainnya yang kurang produktif sehingga tidak memberikan kontribusi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Gallaway dan Vedder (1998), kegiatan pemerintah juga dapat memiliki efek negatif pada produktivitas ekonomi, pada saat *law of diminishing return* terjadi dimana ekspansi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah akan menempatkan pengeluaran dalam kegiatan yang kurang produktif. Pada akhirnya pemerintah menjadi terlalu luas dan akan melakukan lebih banyak kegiatan yang tidak tepat sasaran. Ketika ini terjadi maka hasil negatif akan muncul dan dapat menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi.

4.3.3. Pengaruh Belanja Hibah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja hibah (X_4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. sehingga hasil studi ini menolak hipotesis keempat. hal tersebut terjadi karena alokasi belanja hibah yang diberikan kepada lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat belum diarahkan pada program-program pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut, belanja hibah lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga dan organisasi masyarakat yang tidak memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, belanja hibah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi pada saat menjelang atau pada saat tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), mengindikasikan bahwa belanja hibah digunakan oleh *incumbent* untuk melakukan pencitraan politik sehingga alokasi belanja hibah ini rawan untuk disalahgunakan dengan demikian tujuan dari belanja hibah yaitu menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak tercapai.

4.3.4. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja bantuan sosial (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. sehingga hasil studi ini menerima hipotesis kelima. Proporsi belanja bantuan sosial terhadap total belanja APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat rata-rata secara agregat sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,68%. Meskipun proporsi belanja bantuan sosial terhadap belanja APBD

sangat kecil, belanja bantuan sosial mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan belanja bantuan sosial sesuai tujuan peruntukannya yaitu membantu masyarakat tidak mampu yang mempunyai risiko sosial.

Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk risiko sosial diberikan untuk membantu membiayai pengobatan bagi masyarakat miskin diluar yang ditanggung BPJS, selanjutnya yang digunakan untuk siswa tidak mampu diberikan untuk membantu siswa dan mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai keperluan sekolah atau kuliah dan untuk rumah tidak layak huni digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu memperbaiki rumah sehingga menjadi layak huni. Belanja bantuan sosial tersebut tentunya sangat membantu masyarakat kurang mampu. Dengan belanja bantuan sosial tersebut pemerintah daerah dapat membantu masyarakat tidak mampu mengurangi beban yang harus ditanggung, sehingga masyarakat tidak mampu bisa meningkatkan konsumsinya karena alokasi belanja untuk kesehatan, pendidikan dan rumah bisa dikurangi. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat tidak mampu secara agregat akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu dengan adanya dana bantuan sosial tersebut dapat meningkatkan taraf kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin sehingga akan meningkatkan produktivitas.

4.3.5. Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja pegawai (X_1) berpengaruh positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga hasil studi ini menolak hipotesis keenam. Belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pegawai belum diikuti dengan meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Belanja Pegawai Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang secara agregat tumbuh rata-rata 10,40% per tahun belum mampu memenuhi kebutuhan jumlah aparatur sipil negara terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang diukur melalui IPM. Pengukuran IPM terdiri dari tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam dimensi pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, tentunya ditentukan oleh jumlah tenaga dan kualitas guru yang tersedia. Dalam dimensi kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup tentunya dipengaruhi jumlah tenaga medis yang tersedia.

4.3.6. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja modal (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan

masyarakat (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga hasil studi ini menerima hipotesis ketujuh. Pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang signifikan dikarenakan proporsi belanja modal yang cukup besar dengan rata-rata selama 2010 hingga 2015 sebesar 27,18 % per tahun dalam APBD pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan rata-rata pertumbuhan belanja modal tahun 2010 hingga 2015 sebesar 14,1% per tahun digunakan dengan cukup efektif untuk membangun fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi serta memudahkan masyarakat mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang secara tidak langsung meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mencapai taraf hidup layak dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu belanja modal yang digunakan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat bersifat padat karya (*labor intensif*) sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk membangun berbagai macam infrastruktur yang di butuhkan pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat, dan kesempatan kerja masyarakat selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk berperan aktif melalui kebijakan belanja modal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3.7. Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja barang dan jasa (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga hasil studi ini menolak hipotesis kedelapan. Hal ini dikarenakan belanja barang dan jasa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah seperti perjalanan dinas, ATK, makan dan minum, dan belanja operasional terindikasi tidak efisien karena dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga menyebabkan pemborosan uang negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar terdapat beberapa temuan yang terindikasi kerugian negara/daerah pada belanja barang dan jasa yaitu kelebihan pembayaran perjalanan dinas, kemahalan harga barang (*mark-up*), dan kekurangan volume pengadaan barang dan jasa. Sebagai akibat dari pelaksanaan belanja barang dan jasa yang terindikasi menimbulkan kerugian negara/daerah menyebabkan program dan kegiatan yang diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi tidak efektif dan efisien.

4.3.8. Pengaruh Belanja Hibah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja hibah (X_4) berpengaruh positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga hasil studi ini menolak hipotesis kesembilan. Pengaruh belanja hibah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak signifikan dikarenakan alokasi belanja hibah dalam APBD yang sangat kecil, serta alokasi belanja hibah tersebut belum di arahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat seperti pembinaan dan kemudahan akses pendanaan bagi UMKM. Selain itu, adanya indikasi belanja hibah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk kepentingan pilkada, hal ini terlihat dari tingginya pertumbuhan belanja hibah pada daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada saat menjelang dan saat tahun pelaksanaan.

4.3.9. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa belanja bantuan sosial (X_5) berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga hasil studi ini menolak hipotesis kesepuluh. Pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak signifikan dikarenakan sangat kecilnya porsi belanja bantuan sosial pada total belanja dalam APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dimana rata-rata secara agregat dari tahun 2010-2015 sebesar 0,68%. Kecilnya proporsi anggaran untuk belanja bantuan tersebut tidak mampu untuk memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat, terutama terkait dengan faktor-faktor yang dihitung dalam IPM yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat mengingat rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2014 sebesar 8,51% (BPS, 2016).

4.3.10. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga hasil studi ini menerima hipotesis kesebelas. Pengaruh pertumbuhan ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Meningkatnya pendapatan perkapita ini dinikmati oleh sebagian besar masyarakat karena distribusi pendapatan yang cukup merata di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Distribusi pendapatan yang cukup merata ini dapat dilihat berdasarkan rasio gini Provinsi Kalimantan Barat, dimana rata-rata rasio gini selama 2010-2015 sebesar 0,36 termasuk dalam kategori ketimpangan rendah (BPS, 2016). Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan aktivitas rumah tangga melalui konsumsi untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sehingga masyarakat daerah tersebut menjadi lebih sejahtera, lebih kaya, lebih sehat, lebih berpendidikan yang merupakan indikator angka Indeks Pembangunan Manusia.

5. SIMPULAN

1. Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pada taraf signifikansi $\alpha = 0,10$. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja barang dan jasa belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Belanja hibah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan belanja hibah dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat .
5. Belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja bantuan sosial mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Belanja Pegawai berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja pegawai belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
7. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja modal mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

8. Belanja barang dan jasa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan belanja barang dan jasa dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
9. Belanja hibah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa belanja hibah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
10. Belanja bantuan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja bantuan sosial belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
11. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aviliani. (2009). Mengurangi Problem Investasi di Indonesia. *Jurnal Diplomasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri*. pp 37-57. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kalimantan Barat Dalam Angka*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.
- Badrudin, R. (2011). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah*. Disertasi, Universitas Airlangga, Indonesia.
- Badrudin, R.(2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. (2016). *Pers Rilis Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Dan PDTT Belanja Semester II 2016*. Diakses dari <http://pontianak.bpk.go.id/?p=18853>.
- Ghozali. I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2008). *Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik-Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

- Hendarmin. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 8 (3), 144-155.
- Hutabarat, P. (2013). *Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.
- Liana, L. (2009). Penggunaan Path Analysis untuk Menguji Pengaruh Variabel Intervening pada Paradigma Jalur. *Dinamika Teknik*, 3 (1), 57-68.
- Makrifah, S. A. (2010). *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Tesis, Institut Pertanian Bogor, Indonesia.
- Mangkoesoebroto, G. (2010). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Mirza, D , S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1 (2), 1-15.
- Pane, R. H., Zulkarnaini., & Ekowarso, H. (2011). Kinerja Belanja Hibah Untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Tahap II No.4*.
- Priambodo, A. (2015), Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2007-2013). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Putra. E. P. (2015). *Dampak Program Bantuan Sosial terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia*, Tesis. Institut Pertanian Bogor, Indonesia.
- Ramirez, A., Ranis, G., & Stewart. F. (1998). Economic Growth and Human Capital. *QEH Working Paper No. 18*.
- Ranis, G. (2004). Human Development and Economic Growth. *Center Discussion Paper 887*. New Haven, CT: Economic Growth Discussion Paper.
- Rutherford, R.D. (1993). *Statistical Model For Causal Analysis*. New York: John Wiley & Sons.Inc.
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi dan Manajemen*, 25 (1), 1-12.

- Soepangat, E., & Gaol, H.L. (1991). *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (Ketiga ed). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suryati, D. (2015). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007-2012. *Media Bina Ilmiah*, 9 (7), 20-27.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi, Jilid 1 Edisi Kesebelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Vedder, R., & Gallaway, L. (1998). *Government Size and Economic Growth*. Washington, DC: Joint Economic Committee.
- Zebua, W, F. (2014). *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013)*. Universitas Brawijaya, Indonesia.